

MEMBEDAH NEOFEODALISME

# BASIS

menembus fakta

**ANTONIUS SUMARWAN**

**Indonesia dan Tiongkok:  
Bermitra untuk  
Mewujudkan Visi  
Indonesia Emas**

**HERU PRAKOSA**

**Madinat al- Zahra dan  
Pembelajarannya  
bagi IKN**

**FARRAS PRADANA**

**Yang Beralih  
Jadi Harimau**

REKOR,  
REINGRANASI SERIES, 2012  
karya WIKAN CAHYA,  
koleksi Suci Pudjastuti

Rp35.000,00

JAJARAN BULANAN MINGGUAN NO. 103 TAHUN KE-73, 2024

JURNALISME SERIBU MATA

# BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

**Yayasan BP Basis**

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

**Franz Magnis-Suseno**

Pemimpin Umum

**Sindhunata**

Pemimpin Redaksi

**A. Setyo Wibowo**

Wakil Pemimpin Redaksi

**A. Sudiarta**

Dewan Redaksi

**B. Hari Juliwana**

**Heru Prakosa**

**A. Bagus Laksana**

Redaktur Pelaksana

**C. Bayu Risanto**

Redaktur

**Dian Vita Ellyati**

**Francisca Purnawijayanti**

Redaktur Artistik

**Hari Budiono**

Sekretaris Redaksi

**Anang Pramuriyanto**

Promosi/ Iklan

**Slamet Riyadi, A. Yulianto**

**Willy Putranta**

Administrasi/ Distribusi

**Francisca Triharyani**

Kuangan

**Ani Ratna Sari**

Widarti

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:

BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,

BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN /

**A. Setyo Wibowo**

Mendedah Neofeodalisme ... 2

KACABENGGALA / **Heru Prakosa**

Madinat al-Zahra dan

Pembelajarannya bagi IKN ... 13

SOSIAL / **Antonius Sumarwan**

Indonesia dan Tiongkok: Visi Indonesia Emas &

Abad 21 sebagai Abad Asia ... 26

SASTRA / **Dian Vita Ellyati**

Seabad Navis:

Terhibur, Bertalafur ... 33

SASTRA / **Dian Vita Ellyati**

Seabad Navis: 1001 Wajah Navis ... 43

BUKU / **Alvino Kusumabrata**

*Quo Vadis* Manusia Baru Indonesia ... 47

SOSIAL / **Usman Kansong**

Dia yang Menyalakan Sein Kiri,

tapi Belok Kanan ... 51

PUISI / **Petrus Nandi**

Riwayat yang Limbung

di Gerbang Utara Lamba Leda ... 58

Fragmen Sebuah Minggu Pagi ... 61

CERPEN / **Farras Pradana**

Yang Bersalin Rupa

Menjadi Harimau ... 62



# Mendedah Neofeodalisme

A. SETYO WIBOWO

Minggu, 17 November 2024, di Grobogan, Jawa Tengah, Jokowi terlihat semobil dengan calon gubernur Jawa Tengah dan membagi-bagikan kaus. Meski tak jelas parpolnya, mantan presiden ini tampak seperti jurkam meng-endorse Ahmad Luthfi dari Gerindra.

**S**enin, 18 November, 2024, Jokowi ke Cempaka Putih di Jakarta Timur dan mengampnyekan Ridwan Kamil dari Golkar (bdk. <https://news.republika.co.id/berita/sn5fxx487/tibatiba-berada-di-jakarta-bertemu-pendukung-rksuswono-jokowi-saya-ridwan-kamil>). Dalam sistem demokrasi yang tulang punggungnya adalah parpol, perilaku politik Jokowi terasa aneh, terlalu *out of the box*. Namun, dalam budaya politik kita, perilaku *Raja Jawa* – julukan yang disematkan oleh Bahlil Lahadalia kepada Jokowi – terasa normal dan dimaklumi.

#### Klientelisme

Demokrasi di Indonesia identik dengan klientelisme. Di semua tataran, dari RT, RW, kabupaten, provinsi, sampai nasional, politik berjalan melalui jaringan personal penuh tukar-menukar keuntungan materiel. Relasi tukar-menukar keuntungan materiel terjadi di semua tahapan elektoral secara meluas sehingga orang melihat bahwa demokrasi di Indonesia tak lain adalah ajang jual beli (Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 2019, hlm. 3).

Praktik politik di Indonesia adalah klientelisme *bebas-bebasan* (Aspinall and Berenschot, hlm. 7)

Para politisi merebut kekuasaan dengan cara membagi-bagi uang atau bansos kepada para pemilih. Dari mana dananya? Bagi politisi yang baru masuk ke kancah pertarungan, dana ia dapatkan dari kawan-kawan pengusaha atau senior-penguasa yang lewat jabatan yang dimilikinya memperdagangkan kontrak kerja, izin, atau kemudahan-kemudahan lainnya kepada para pengusaha. Sementara politisi petahana, bisa dipastikan bahwa pada periode sebelumnya ia telah mengeruk sumber daya yang bisa dia ambil dari kewenangan jabatannya.

Entah pilpres atau pilkada pada tahun 2014, 2019, atau 2024, demokrasi di Indonesia ya begitu-begitu saja cara kerjanya. Seorang politisi membentuk tim sukses, dengan tukar-menukar keuntungan di situ, entah wujudnya uang atau janji jabatan. Kemudian, timses bergerak memenangkan calonnya dengan cara membagi-bagi uang, bansos, atau janji kepada para pemilih. Proses rotasi kekuasaan menjadi sekadar kegiatan *quid pro quo* (bahasa Latin, artinya “sesuatu untuk sesuatu yang lain”, tukar-menukar). Rakyat menerima uang atau bansos, politisi mendapatkan suara. Program dan debat politik sekadar gincu pemanis bibir agar prosesnya tampak rasional. Padahal, semua orang juga tahu bahwa yang terjadi hanyalah *the politics of the belly* alias “politik perut”. Praktik politik pragmatis ini dikenal juga dengan istilah demokrasi *wani piro* atau politik transaksional (Aspinall and Berenschot, hlm. 4, 6).

#### Asal-Usul Patronase

Nama lain untuk politik klientelistik ini adalah *patronage democracy* atau demokrasi patronase. Aspinall dan Berenschot (hlm. 3, 12) menyebut nama para ahli yang sudah menengarai soal ini (antara lain: van Klinken 2009; Schulte Nordholt dan van Klinken 2007; Simandjuntak 2010, 2012). Dalam sistem ini, seorang *patron*, entah calon presiden, calon gubernur, atau calon anggota dewan, mempertukarkan uang dan janji kepada *client*-nya, yaitu timses. Pada tahap selanjutnya, si calon dan timsesnya, sebagai *patron*, menerbar uang, bansos, dan janji-janji kepada rakyat yang adalah *client*-nya. Pada akhirnya, karena loyalitas dan balas budi, rakyat akan memberikan suaranya kepada sang *patron*.

#### Orde Baru

Menurut Aspinall dan Berenschot (hlm. 9) politik patronase tidak jatuh dari langit. Asal-usul terdekat praktik demokrasi *wani piro* ini bisa dilacak pada periode otoritarianisme Orde Baru 1966–1998. Pada era ini, sistem patronase dijalankan secara sentralistis dan lumayan tertutup. Ini sangat berbeda dengan model demokrasi *wani piro* saat ini yang sudah merambah bahkan sampai ke tingkat desa. Ciri sistem patronase dalam Orde Baru, *pertama*, tampak dalam distribusi jabatan dan barang lewat entitas nonpartai. *Kedua*, Orde Baru mengontrol penggunaan sumber-sumber daya yang dieksploitasi hanya di tangan segelintir orang kunci.

Pada awal Reformasi 1998, partai-partai politik sama sekali tidak memiliki sumber daya dan belum memiliki budaya mengeruk sumber daya lewat birokrasi. Namun pelan tapi pasti, parpol-parpol mulai memasuki akses-akses sumber daya tersebut. Uniknya, karena adanya berbagai perubahan undang-undang, sistem pemilu yang dibangun tidak pernah bersifat “*party-centered system*” tetapi ke “*candidate-centered system*” sehingga relasi *patron-client* yang muncul juga

“

Demokrasi *patron-client* bebas-bebasan tanpa logika muncul dari warisan birokrasi otoriter Orde Baru dan dari konsekuensi desain sistem elektoral yang berubah-ubah selama Reformasi

unik. Di satu sisi, para kandidat tentu membutuhkan parpol. Namun di sisi lain, fokus utama mereka adalah bagaimana memenangkan pemilihan dirinya sendiri sehingga sering kali timses yang dibuat juga tidak ada hubungannya dengan parpol. Saat Prabowo terpilih menjadi presiden, orang memilihnya bukan karena parpol, tetapi karena faktor Jokowi. Bahkan Gibran, anak Jokowi, tak jelas lagi parpolnya. Menjelang pilkada di Jateng, calon Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dari Partai Gerindra sangat menggantungkan diri pada Jokowi selama kampanyenya, padahal mantan presiden ini tak punya parpol apa pun.

Demokrasi *patron-client* bebas-bebasan tanpa logika muncul dari warisan birokrasi otoriter Orde Baru dan dari konsekuensi desain sistem elektoral yang berubah-ubah selama Reformasi (Aspinall and Berenschot, hlm. 9)

#### Studi James Scott 1970-an

Agak lebih ke belakang lagi, menurut Aspinall dan Berenschot, studi tentang klientelisme (atau *patron-client*) awalnya dimulai dengan kajian tentang relasi para tauke kaya dengan petani miskin (hasil studi James Scott 1972). Pada saat pakeklik atau musim tanam, para tauke memberikan bantuan uang kepada para petani. Sebagai gantinya, para petani mesti menyertorkan hasil panennya, sering kali dengan harga rendah, kepada para tauke yang membantunya.

Pada saat-saat sulit, para petani mau tak mau harus menggantungkan hidupnya kepada para tauke yang biasanya mengeksploitasi mereka. Loyalitas para petani kepada *patron* kemudian ditransfer ke dunia politik, entah untuk para tauke sendiri, atau untuk teman dari para tauke, atau kepada para birokrat, atau kepada para pimpinan parpol yang menggantikan peran tauke. James Scott (1972) menunjukkan relasi *patron-client* di Asia Tenggara direproduksi dalam interaksi politis. Di wilayah yang dikuasai, para petani memberikan pelayanan dan kerja kerasnya kepada para tauke demi mendapatkan perlindungan dan pertolongan pada saat pakeklik (Aspinall dan Berenschot, hlm. 22). *Patron-client* muncul karena masyarakat yang tidak setara.

Sejauh pada era Reformasi masyarakat Indonesia masih tidak setara, maka situasi ini memungkinkan kaum elite politik dan oligarki mendominasi rakyat (Aspinall dan Berenschot, hlm. 10). Mereka mendominasi dengan mengeksploitasi rasa solidaritas: di satu sisi, *patron* menunjukkan rasa tanggung jawabnya atas *client*

“

Dengan pola seperti itu, menurut saya, relasi *patron-client* tak lain adalah reaktualisasi feodalisme, sebuah budaya kuno yang sebenarnya sudah hilang, namun jiwanya melandasi relasi *patron-client*.

mereka yang miskin, di sisi lain, si miskin (*client*) diusik suara hatinya untuk bersikap loyal dan membalas budi kepada si *patron*.

#### Budaya Feodal

Bila hendak dicari lebih jauh lagi, relasi *patron-client* memiliki akar yang dalam sepanjang sejarah Indonesia. Relasi yang ada saat ini adalah hasil modifikasi dari interaksi sosial yang sudah berakar lama. Para sejarawan yang meneliti kerajaan-kerajaan pada era prakolonial menyimpulkan bahwa model pemerintahan para raja pada era Majapahit dan Mataram bersifat personal: tidak ada aturan yang jelas, namun *patron* (raja) dan *client* (bupati) terikat oleh semacam transaksi. Raja memberi jabatan dan tanah, sebaliknya, penguasa kecil (bupati) wajib setor upeti dan menyediakan kebutuhan kerajaan (Aspinall dan Berenschot, hlm. 22). Dengan pola seperti itu, menurut saya, relasi *patron-client* tak lain adalah reaktualisasi feodalisme, sebuah budaya kuno yang

sebenarnya sudah hilang, namun jiwanya melandasi relasi *patron-client*.

Apa itu feodalisme? Ada penjelasan menarik dari sebuah edisi kuno Majalah *Basis*. Menurut Rahmat Subagya, "Sekitar Feodalisme di Indonesia", *Basis*, Tahun ke-10, Oktober 1960 – September 1961, hlm. 33-42, feodalisme bisa ditelusuri maknanya lewat sejarah Eropa. Berikut ini saya akan memarafaskan uraian Rahmat Subagya di halaman 34-36.

### Feodalisme di Eropa

Di Eropa, istilah feodalisme berasal dari bahasa Prancis kuno *fehu-öd, feod, feud*, yang berarti pinjaman, utamanya tanah yang dipinjamkan untuk maksud politik. Lawan katanya adalah *all-öd* atau milik sendiri. Istilah *feod* berasal dari bahasa Latin *feodum* atau *feudum* yang dalam tradisi Jawa mirip dengan tanah *gumantung, gaduh*, atau *paratantra*. Lawan katanya, *all-öd* menyerupai tanah *yasen, yosobondo*, atau *Swatantra*.

Pada era Imperium Romawi (sampai abad 6 Masehi), sebuah pemerintahan yang sangat sentralistis, ada kesadaran tinggi mengenai hak milik serta ragam hukum yang melindunginya. Saat Romawi ini runtuh, muncullah Karel Agung (748-814) yang menyatukan Eropa dengan nama *Carolingian Empire*. Namun, setelah Karel Agung wafat, imperiumnya terpecah-pecah. Pada era yang disebut sebagai Abad Pertengahan, muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Karena uang belum banyak dikenal, raja-raja tidak bisa menggunakan uang untuk mempertahankan kekuasaannya. Demi mencegah kekacauan dan menjaga keamanan wilayah, para raja memanfaatkan sistem organisasi suku yang sudah ada sejak berabad-abad sebelumnya. Para raja meminjamkan daerah-daerah beserta penduduknya kepada bawahan-bawahannya, misalnya pegawai tinggi kerajaan, kaum militer/aristokrat, atau ahli hukum. Bawahan-bawahan ini berhak memanfaatkan sebagian hasil kerja penduduk dan hasil bumi di wilayahnya untuk dirinya sendiri. Namun, ia wajib menjamin keamanan dan keadilan di wilayah yang dipercayakan tersebut. Selain itu, ia juga wajib membayar upeti tahunan kepada raja serta menyiapkan bala bantuan (*aribana = kerahan*) yang diminta raja.

Dengan sistem tanah pinjaman seperti itu, di satu sisi, raja mengurangi sedikit kekuasaannya. Namun di sisi lain, ia mendapatkan kesetiaan dan keahlian kerja dari para bawahannya yang ia beri gelar *knight, vassal, count, senior, seigneur*, dan lain-lain. Dari pihak rakyat,

di satu sisi, rakyat memang kehilangan sedikit hak atas tanahnya, tapi di sisi lain, rakyat mendapatkan keamanan dan perlindungan. Dalam sistem ini, meski relasinya tidak setara, ada semacam solidaritas, ikatan kesetiaan timbal balik antara atasan dan bawahan. Sistem ini begitu efektif sehingga dari abad ke-9 sampai abad ke-12, banyak pemilik tanah yang bebas (*ber-all-öd*) dengan sukarela menyerahkan wilayahnya menjadi *feodum* supaya dengan masih mempertahankan hak pakainya secara terbatas, mereka mendapatkan jaminan perlindungan.

Hubungan feodal antara atasan dan bawahan kemudian diatur lewat perundangan yang rinci berupa *charter* atau piagam. Muncul pula tradisi sumpah pengabdian (*homagium, Mannschaft*) dan rapat tahunan (*Hoffahrt*) secara musyawarah mufakat. Muncul tradisi kekesatriaan, utamanya kesetiaan pada perjanjian, dengan segala tekek bengeknya, seperti aturan upacara yang mentereng, ragam gelar, dan pakaian kebesaran yang bertingkat-tingkat. Itulah suasana feodal yang terbangun pada Abad Pertengahan yang ditopang oleh ragam aturan yang rumit. Namun, meski begitu, feodalisme lama-kelamaan merosot. Banyak atasan menyalahgunakan kekuasaan, banyak pula bawahan yang memberontak dan ingin mengelola sendiri wilayahnya. Muncullah ketegangan di sana-sini, sehingga akhirnya sistem feodalisme dihapus.

Tahun 1660, pemerintah Inggris membatalkan segala hak feodal. Tahun 1717, negara Brandenburg menjalankan *allodifikasi* tanah-tanah pinjaman. Kerajaan Prusia menirunya pada tahun 1750. Montesquieu, seorang filsuf Prancis, dalam bukunya yang terkenal *L'Esprit des Lois* (1748) untuk pertama kalinya mendefinisikan istilah feodalisme bagi segala apa yang bersangkutan paut dengan pemerintahan atas dasar pinjaman tanah. Revolusi Prancis menghapus segala hak feodal dalam putusan 4 Agustus 1789 dan 17 Juli 1793. Negeri Belanda meniru penghapusan itu pada tahun 1800. Jerman menghapus hak-hak feodal pada tahun 1850 dan Austria melakukan pencabutan hak feodal pada tahun 1862.

### Feodalisme di Nusantara

Bagaimana dengan feodalisme di Nusantara? Di halaman 39-41, Rahmat Subagya berpendapat bahwa feodalisme tidak ditemukan pada era Hindu, melainkan terutama pada era kesultanan. Menurut Rahmat Subagya, pada zaman Hindu, raja-raja Hindu di

Nusantara suka meniru cara memerintah India sambil menyesuaikan politiknya dengan keadaan asli di sini. Di bidang agama dan adat istiadat, raja-raja tidak campur tangan dalam urusan desa. Tetapi sebagai kepala kerajaan, mereka menyatakan diri sebagai tuan atas keseluruhan daerah pemerintahannya dan karena itu memungut sebagian hasil bumi sebagai pajak tanah. Kitab *Dharmasastra* memuat pasal yang berbunyi: tanah adalah milik raja (*apan drwa sang prabhu lmuah iki*). Bea itu dipakai terutama untuk menutup ongkos-ongkos hidup keraton. Meskipun pemungutan bea dan *kerja paksa* adakalanya amat berat untuk penduduk desa, namun mereka tetap merdeka. Oleh karena itu, tidak ada **feodalisme di situ**. Yang terjadi hanyalah cara memungut bea dalam masyarakat yang belum memakai uang sebagai alat pertukaran. Uang saat itu memang sudah ada, tetapi hanya dipakai untuk keperluan upacara (*suwarnapushpa*).

Menurut Rahmat Subagya, pada era ini ada praktik yang mirip-mirip dengan feodalisme ketika raja-raja memberikan tanah dengan penduduknya kepada orang yang berjasa besar kepadanya, terutama para Brahmana (disebut dengan istilah *bhumidana*). Di tanah-tanah ini, rakyat dibebaskan dari pajak dan kerja paksa karena jasanya sudah mendirikan candi, membuat jembatan, atau meredam kekacauan. Tanah atau daerah yang dibebaskan disebut *simadharma*, *dharmalepas*, *svatantra*, atau *rajadharna*. Ukurannya ditetapkan dalam upacara *simapujana* dan isi pembebasan termaktub dalam suatu piagam (atau prasasti). Menurut penelitian Mr. Kusumaatmadja, di tanah Jawa banyak desa *svatantra* kemudian diubah menjadi *wakaf* dan desa *mijen* atau *perdikan*. Pembebasan itu dapat dicabut bila penduduk memberontak seperti pernyataan kitab *Pararaton* fol. 26. Tapi kerap kali penghibahan tanah menyebabkan suatu tanah menjadi milik turuntumur dengan syarat bahwa hak raja atas tanah itu tetap dijamin. Kitab *Negarakrtagama* memberi tahu kita bahwa para mantri di negara Majapahit menerima tanah *sima* sebagai gaji (sarga 82), bahwa raja membalas upeti dan karya rakyat dengan perlindungan (s. 88) dan bahwa di tanah Jawa amat banyak *simadharma* dibagikan kepada para Brahmana dan tokoh-tokoh agama Budha. Namun, meski mirip feodalisme, soal-soal perjanjian wajib menyediakan bala bantuan tidak ada bukti kitab atau prasasti apa pun yang menyatakannya. Jadi, meski ada kemiripan dengan feodalisme secara umum, perbedaannya sedemikian besar sehingga menurut

Rahmat Subagya, model pemerintahan raja-raja Hindu tidak bisa disebut sebagai feodal. Merujuk pada istilah aslinya, pemerintahan itu dinamai sistem *dharmaraja* atau *simadarma*, atau adat *svatantra*.

Baru pada zaman pemerintahan para sultan, kita bisa menemukan unsur-unsur feodalisme. Pada era ini, ada pangeran-pangeran dan adipati-adipati sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas pengerahan tentara dan urusan tanah. Buku-buku *Babad* memberitakan bahwa mereka harus memberi upeti (*bulubekti*, *pisungdung*, *rajapundut*, *rajakaya*, *abon*) kepada keraton dengan menghadap (*sowan*) satu kali setahun sambil menunjukkan kebaktiannya. Sebagai balasan, mereka diberi atau dipinjami daerah yang dikepalainya sebagai tanah jabatan, di mana mereka berhak memungut sebagian dari hasil bumi dan tenaga kerja rakyat tanpa dibayar. Tanah yang dipinjamkan kepada mereka dikatakan *tanah gaduh*, *tanah patuh*, *lungguh* atau *siti pangrembe*. Pajak dikumpulkan oleh beberapa pegawai sebagai *lurah patuh*, *lurah bangok*, *bekel ngarep*, *bekel maron*, dan lain-lain. Karena jaringannya peredaran uang, maka segala jabatan diupah dengan hak guna usaha atas penghasilan tanah. Kedudukan para bupati pada waktu itu dapat dikatakan kedudukan feodal. Berkembang pula saat itu paham kesetiaan dan kesatriaan, dan kesadaran bahwa mereka wajib melindungi rakyat.

Pada era Penjajahan, menurut Rahmat Subagya, sejak 1709 para bupati, satu per satu, dipaksa mengalihkan penyerahan *bulubekti* serta pengakuan dari Keraton Mataram kepada VOC di Batavia. Para bupati harus mengumpulkan hasil tani dan apa pun yang bisa dia ambil dari wilayahnya kepada kompeni. Rakyat jelata pada waktu itu dibebani ragam kerja tanpa upah: pertama dalam ikatan dusun (*gugur gunung*), kedua untuk keperluan bupati (*karyanagara*), ketiga untuk si penjajah (rodi). Rakyat menjadi miskin semiskin-miskinnnya dan tidak menerima apa pun sebagai balasan atas kurban berat itu. Mengutip Jajhri dalam *Perjuangan Kita*, pada era penjajahan, "Feodalisme dalam negeri dikawinkan dengan dunia kolonial". Pada era itu, kolonialisme memanfaatkan ikatan-ikatan feodal sedemikian rupa sehingga unsur-unsur baik feodalisme lenyap dan yang tertinggal sekadar ciri-ciri buruknya saja.

Pada abad ke-19, Gubernur Jenderal Raffles berupaya melenyapkan praktik *feodal barbarism*. Lalu, Gubernur Jenderal Daendels berusaha menghapuskan feodalisme dengan mengurangi kekuasaan para bupati,

menghilangkan hak-hak mereka atas gelar dan atas pengiring. Ia mengganti semua privilese feodal dengan gaji dan pangkat birokrasi. Akhirnya, peraturan tahun 1918 tentang “landreform” atas tanah kerajaan-kerajaan Jawa mengakhiri pemerintahan feodal meskipun beberapa sisa-sisa dalam tingkatan desa (misalnya tanah *bengkoh*) terus dilanjutkan.

### Patrimonialisme

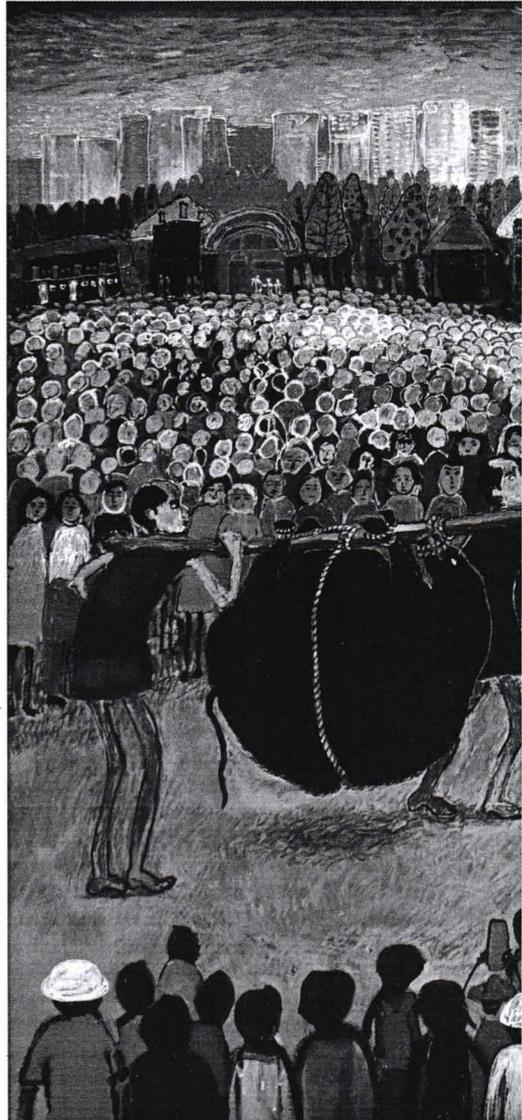
Dari artikel yang ditulis tahun 1960 ini kita melihat bahwa feodalisme dalam arti ketat tentu sudah tidak ada. Namun, bila tanah pinjaman (*feod*) ini kita ganti dengan *patrimony* (seperti *cultural patrimony*, semacam warisan/*heritage*) yang bisa dikuasai dan dihaki meski bersifat *intangible*, maka kita bisa mengubah istilah feodalisme dengan patrimonialisme. Maksudnya, apa yang terjadi dalam praktik kekuasaan di Indonesia hari-hari ini dijalankan bukan atas dasar kepemilikan tanah, melainkan atas dasar kepemilikan *patrimony* berwujud jabatan politis. Kepemilikan jabatan ini lantas dijalankan dalam skema tradisional *patron-client* (sebagaimana hasil penelitian James C. Scott, “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”, dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), hlm. 91–113, diterbitkan oleh American Political Science Association).

Patrimonialisme inilah yang saya sebut sebagai Neofeodalisme. Istilah terakhir lebih sederhana dan lebih jelas: para pejabat politik, versi kontemporer untuk para adipati zaman dulu, adalah para *patron* yang secara personal mengelola dan meminjamkan jabatan kepada bawahannya (*client*-nya) dengan imbal balik upeti dukungan-dukungan. Landasannya bukan lagi tanah, tapi *patrimony* (jabatan politis yang tak kasat mata).

### Relasi Dinamis Patron-Client

Ketidaksetaraan di dasar relasi *patron-client* mengandaikan bahwa posisi *patron* selalu kaya dan posisi *client* selalu miskin. Di ranah pertanian bisa jadi relasi itu demikian adanya. Para tauke selalu kaya, sementara para petani selalu miskin.

Namun, di arena politik demokratis, apakah selalu demikian halnya? Betul bahwa rakyat memang miskin dan objek penyebaran bansos. Namun, secara politis, meski sudah menerima bansos, rakyat toh tahu bahwa mereka memiliki “modal politis”. Artinya, rakyat tahu bahwa dalam konteks pemilihan, suara mereka sangat



Tini Djameen, “Dialog”, AOC, 83,5 x 83,5 cm, 2023 | Bentara Budaya Yogyakarta



bernilai tinggi. Entah memberikan suaranya atau tidak, rakyat tahu bahwa di politik demokratis ini mereka sesungguhnya berposisi lebih menentukan daripada mereka yang menyebar bansos.

Kelihatannya, analisis Aspinall dan Berenschot terlalu menekankan pada modal uang. Dalam politik Indonesia, tentu saja uang adalah modal terpenting dalam politik. Namun, berkaca pada seorang pemikir Prancis, Pierre Bourdieu, ada modal-modal lain, seperti modal budaya, simbolis, dan sosial yang perlu dikaji untuk melihat bahwa relasi *patron-client* bisa jadi bukan hanya politisi (*patron*) dan rakyat (*client*), tetapi juga bisa berbalik *patron* (rakyat) dan *client* (politisi). Kondisi bisa berbalik tergantung dari arena.

Berkaca dari pemikiran Pierre Bourdieu, arena politik adalah sebuah arena yang dinamis. Tidak ada satu model ketidaksetaraan yang menjadi faktor determinan. Yang ada adalah “ragam ketidaksetaraan” yang bermain sehingga posisi *patron* kadang menjadi *client*, posisi *client* kadang bisa menjadi *patron*. Semua tergantung pada arenanya.

Bourdieu membuat teori tentang *espace social* (ruang sosial) di mana individu-individu berinteraksi di dalamnya sesuai posisi masing-masing mengikuti *capital* (diterjemahkan modal) yang dimiliki. Di dalam ruang sosial itu, tiap individu berusaha menempati posisi dominan. Oleh karena itu, ruang sosial adalah sebuah *espace de lutte* (ruang pertempuran, ruang perjuangan). Pertempuran-pertempuran spesifik di dalam ruang sosial itu, misalnya persaingan politik, persaingan olahraga, dan lain-lain disebut *champ* (arena; bdk. Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, Paris: Armand Colin, 2019, première édition 2011, hlm. 99).

### Pengaruh Marx

Bourdieu meminjam istilah ekonomis *capital* (modal) dari Karl Marx. Dalam pemikiran Marx, individu-individu disebut sebagai borjuis atau proletar sesuai kepemilikan *capital économique* (modal ekonomis). Kaum borjuis memiliki sarana-sarana produksi, misalnya, modal uang, alat produksi, tanah, atau pabrik. Kaum proletar adalah mereka yang hanya memiliki tenaga. Dalam pemikiran Marx, istilah modal ekonomis hanya merujuk pada aktivitas produksi. Maka pertempuran antara kelas dominan, yaitu pemilik alat produksi dan kelas yang terdominasi hanya terpusat pada seputar aktivitas produksi (Anne Jourdain et

Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 100).

### Teori Empat Modal

Bourdieu mengembangkan pemikiran Marx, dan tidak membatasi soal modal hanya dalam ranah ekonomis. Ada ragam modal yang ditengarai oleh Bourdieu: modal ekonomis, modal budaya, modal sosial, modal simbolis, modal politik, modal estetik, dan lain-lain. Ragam modal ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi individu yang memilikinya. Dipahami sebagai semacam *stock* atau kumpulan, ragam kapital ini dikumpulkan oleh individu dalam rangka mendapatkan hasil atau keuntungan yang bersifat materiel maupun nonmateriel.

Secara umum, Bourdieu membedakan empat modal (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 100-102). *Pertama*, modal ekonomis: sumber-sumber ekonomis yang dimiliki individu, misalnya, gaji, dan ragam kepemilikan materiel. Modal ekonomis, menurut Bourdieu, mempermudah individu mendapatkan ragam modal lainnya. Modal ekonomis diteruskan dari generasi ke generasi lain lewat warisan.

*Kedua*, modal budaya: sumber-sumber budaya yang membuat individu mampu mengapresiasi benda-benda atau praktik-praktik budaya yang tinggi. Dalam analisis mengenai reproduksi sosial di sekolah-sekolah Prancis, Bourdieu mengamati bahwa sekolah Prancis memberi penghargaan tinggi pada "budaya intelektual".

Dalam hal itu ada tiga jenis:

1. *modal budaya yang ter-inkorporasi* atau tertubuhkan, semacam kebiasaan yang sudah dimiliki, misalnya orangtuanya lulusan *Grand Écoles*, sehingga suasana atau budaya di rumah mau tak mau "intelektual". Modal ter-inkorporasi ini diwariskan ke generasi lanjut lewat pembudayaan dan asimilasi. Prosesnya tentu memakan waktu.
2. *modal budaya yang ter-objektifkan* dalam bentuk benda, seperti lukisan tertentu, buku, kamus, alat-alat tertentu. Modal ter-objektifkan ini juga butuh waktu untuk membuat generasi yang lebih muda memahaminya.
3. *modal budaya yang ter-institusionalisasi*, misalnya gelar dan ijazah. Berbeda dengan modal ekonomis, modal budaya akan hilang saat individu yang memilikinya meninggal dunia.

*Ketiga*, modal sosial: sumber-sumber yang ada, atau potensial ada, saat individu memiliki jaringan relasi, entah yang terlembagakan, entah yang didapat dari pergaulan. Semakin jaringannya luas dan orang dalam jaringannya memiliki modal ekonomis dan modal budaya yang kuat, maka modal sosial individu juga makin kuat. Namun, ini juga tergantung dari kemampuan individu tersebut dalam memaksimalkan potensi dari jaringan. Modal sosial tidak bisa "sekali selama-lamanya" dimiliki. Modal ini harus dirawat. Bisa diwariskan juga, tetapi harus benar-benar dirawat lewat pertemuan dan kontak rutin.

*Kempat*, modal simbolis: sumber-sumber yang merujuk pada prestise dan pengakuan publik. Bourdieu sendiri menyatakan: "modal simbolis sebenarnya tak lain adalah modal ekonomis atau modal budaya yang dimiliki dan diakui". Saat individu memiliki modal simbolis, maka ia memiliki semacam kekuasaan terhadap mereka yang mengakuinya. Modal simbolis, misalnya adalah tanah warisan dari seseorang yang terkenal, misalnya, rumah Sukarno. Modal simbolis ini kalau ditukar dengan uang, biasanya memiliki harga yang luar biasa tinggi.

Bagi Bourdieu, dalam ruang sosial, kita tidak hanya menemukan satu jenis ketidaksetaraan, misalnya pemilik modal *versus* proletar, tetapi banyak aneka ketidaksetaraan seturut ragam kapital yang dimiliki oleh individu-individu di dalamnya.

Itu maknanya, berbeda dengan Karl Marx, posisi individu dalam masyarakat tidak ditentukan sekadar oleh relasi produksi. Kriteria ekonomi tidak menjadi tolok ukur satu-satunya untuk menentukan posisi seorang individu. Bourdieu melihat ruang sosial bersifat relasional, di mana posisi individu tidak pernah absolut, melainkan muncul dalam perbandingan dan relasinya dengan individu lain yang memiliki modal-modal berbeda (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 103).

### Teori Arena/Champ

Bourdieu pertama kali menggunakan istilah *champ* (arena) pada tahun 1966. Istilah *champ* merujuk pada macam-macam wilayah dalam sebuah hidup sosial, di mana proses diferensiasi terjadi secara progresif akibat pembagian kerja, sehingga lalu menjadi otonom. Sebuah *champ* menjadi otonom tergantung pada apa yang menjadi pertarungan di situ (Anne Jourdain et

Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 114).

Yang menjadi pertarungan dalam arena politik misalnya adalah kekuasaan. Maka di seputar pertempuran merebut kekuasaan inilah, sebuah arena politis terbentuk. Di arena yang lain, pertarungan dalam arena ekonomis adalah soal akumulasi kekayaan. Sementara yang menjadi pertarungan dalam arena artistik adalah pengakuan

Individu-individu yang terlibat dalam sebuah arena akan bertindak sesuai apa yang dipertaruhkan, dan ia bertindak untuk mendapatkan atau mempertahankan modal spesifik yang diperebutkan di arena tersebut (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 114). Untuk menggambarkan sebuah arena, Bourdieu menggunakan metafora permainan. Tiap arena memiliki aturan mainnya sendiri, yang membentuknya menjadi arena yang spesifik. Aturan ini mengizinkan individu yang terlibat di dalamnya mendapatkan modal spesifik yang diperebutkan. Misalnya, ada aturan rekrutmen yang menjadi landasan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh. Di arena akademis, individu harus bergelar doktor supaya bisa menjadi dosen. Atau adanya aturan semacam "ritus konsekrasi" di mana seseorang dianggap berhasil jika mendapatkan hadiah sastra atau pernah memenangi piala dunia (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 115).

Di dalam arena, orang menganggap arena ada karena keterlibatan penuh pada permainan, yang merupakan sebab sekaligus akibat dari adanya permainan. Supaya sebuah permainan benar-benar eksis, maka dibutuhkan orang-orang yang percaya pada permainan tersebut, percaya bahwa yang dipertaruhkan di situ memang bernilai, percaya pada pentingnya berpartisipasi pada permainan untuk mendapatkan apa yang diperebutkan itu. Ini yang disebut Bourdieu *illusio*, yaitu percaya bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan memang layak diperebutkan. Kata *illusio* akarnya dari bahasa Latin *ludus* yang artinya adalah permainan. (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 115).

Kata *illusio* (ilusi) ini menggambarkan dengan bagus bahwa dalam permainan memang ada aspek ilusif atau absurd bagi mereka-mereka yang tidak tahu atau tidak terlibat atau tidak percaya pada permainan tersebut.

Bagi seorang teman yang tidak tahu-menahu soal sepak bola, maka saat dia bertemu dengan seorang

Messi misalnya, dia akan merasa biasa-biasa saja. Ia tidak paham siapa Messi. Pun ketika banyak orang berbondong-bondong meminta tanda tangan pada Messi, ia tetap tidak paham apa pun. Lalu, kalau ada orang yang menggoblok-goblokkannya: "Kenapa tidak *selfie*? Kenapa tidak minta tanda tangan?" dan seterusnya, maka ia akan menjawab, "Buat apa? Memang dia siapa? Kenapa semua pada ribut? Absurd ah!"

Interiorisasi dari *illusio* dalam sebuah arena akan menciptakan apa yang disebut *habitus* sesuai dengan arenanya. *Habitus* adalah produk dari persepakatan ontologis antara struktur mental individu dengan struktur objektif ruang sosial. Dalam arena pendidikan misalnya, anak yang berhasil biasanya adalah anak-anak yang di dalam keluarganya sudah memiliki budaya sekolah sehingga mereka lebih siap menghadapi tuntutan-tuntutan persekolahan. Anak-anak ini mendapatkan *habitus* pendidikan, tanpa menyadarinya, yang membuat mereka siap dan langsung kerasan saat berada di sekolah. Itu artinya mereka tahu bagaimana bisa berhasil di situ. Dengan spontan anak-anak tiba-tiba "tahu" bagaimana harus bermain di arena pendidikan (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 115).

*Habitus* membuat praktik-praktik seorang individu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan dari arena, tanpa si individu itu harus melakukan pertimbangan sadar tentang kepentingan-kepentingannya (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 116).

Dalam sebuah arena, ada ragam relasi-relasi yang terbentuk. Dari sudut pandang statis, sebuah arena adalah tempat kekuatan-kekuatan berkumpul. Di dalam arena, tiap individu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan itu yang menentukan posisi mereka. Selalu ada individu yang dominan, dan ada yang didominasi. Menurut Bourdieu, mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak akan memaksimalkan caranya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin meski dia juga harus bersiap menghadapi perlawanan dari yang didominasi

Dari sudut pandang dinamis, sebuah arena adalah ajang pertempuran. Individu di dalam arena akan saling berhadapan untuk mendapatkan atau melestarikan apa yang menjadi pertarungan di situ. Namun, pertempuran di sini tidak lalu membuat kita menyimpulkan seperti para marxis bahwa ada konflik sentral yang menjadi

struktur dasar sebuah masyarakat (Anne Jourdain et Sidonie Naulin, *La sociologie de Pierre Bourdieu*, hlm. 117).

**Dinamika Arena Politik**

Dalam sebuah arena politik, individu-individu yang terlibat akan berusaha memenangkan kekuasaan atau melestarikan kekuasaannya. Posisi *patron* dan *client* bisa berubah-ubah sesuai arena yang dihadapi. Misalnya, kalau berbicara tentang arena politik maka kita bisa membayangkan dua jenis arena: pertama, arena saat kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan, seperti arena proses pemilu, dan, kedua, arena saat politik kekuasaan berjalan sehari-harinya, yaitu arena bisnis sehari-hari.

Dalam arena politik proses pemilu, seorang caleg atau capres adalah *client*. Ia membutuhkan suara rakyat. Untuk itu ia harus menyeter upeti/uang kepada rakyat. Caleg/capres memang memiliki modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya yang kuat. Namun, ia tak punya modal simbolis terpenting, yaitu status atau kekuasaan sebagai anggota dewan atau gubernur atau presiden. Ia sedang berproses mengejar modal simbolis ini. Ia menginginkannya. Maka karena kekuasaan hanya bisa dicapai lewat pileg, mau tak mau ia menjadi *client*, yaitu orang yang butuh.

Sedangkan posisi rakyat adalah *patron*. Mereka ini yang menerima upeti. Rakyat kebanyakan memiliki modal ekonomi kecil, modal sosial dan budaya kecil, tetapi modal simbolisnya besar. Rakyat memiliki monopoli modal simbolis karena mereka yang memegang kedaulatan rakyat. Di arena proses pemilu, saat si caleg atau capres berusaha mengejar kekuasaan, ia mau tak mau menjadi *client*, sementara sang pemegang kedaulatan adalah rakyat (*patron*-nya).

| Patron (Rakyat)   | Client (Caleg)   |
|---|--|
| Modal ekonomi: mayoritas lemah  | Modal ekonomi: kuat  |
| Modal jaringan: mayoritas lemah   | Modal sosial: kuat karena punya jaringan ke kampus, ke preman, ke pengusaha, ke segala lini  |
| Modal simbolis/budaya: sangat kuat karena dalam pemilu, rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemberi legitimasi, pemberi suara | Modal simbolis/budaya: bisa jadi kuat karena dia anak seseorang, tetapi secara umum tetap lemah karena ia masih calon dan tergantung pada suara rakyat |

Namun, begitu pilkada atau pemilu selesai, dalam arena politik pemerintahan sehari-hari, begitu seseorang sudah terpilih, maka presiden/gubernur/anggota dewan memiliki semua modal yang dia perlukan, utamanya modal simbolis. Maka, di sini ia menjadi *patron*. Bisa jadi ia sudah kaya dengan modal ekonomi besar, bisa jadi jaringannya luas, modal budaya juga kuat. Ditambah dengan modal simbolis kekuasaan, maka ia ada dalam posisi tawar tinggi. Dan, ia bisa mengonversi semua modal itu menjadi uang.

Sementara rakyat, mau tak mau menjadi *client*. Jika orang yang punya masalah bisnis ingin mengubah peraturan tertentu, mau tak mau harus berurusan dengan politisi. Rakyat tak punya modal simbolis. Meski si rakyat mungkin punya uang dan jaringan, tetap saja harus bertekuk lutut di depan politisi. Karena rakyat yang butuh, maka terpaksa ia harus setor upeti kepada anggota dewan.

| Patron (Politisi)   | Client (Rakyat)                |
|---|--------------------------------|
| Modal ekonomi: kuat   | Modal ekonomi: mayoritas lemah |
| Modal sosial: jaringan kuat   | Modal sosial: mayoritas lemah  |
| Modal simbolis: kuat (memiliki kekuasaan yang bisa dikonversi menjadi apa saja) | Modal simbolis: lemah          |

**Penutup**

Pada era neofeodalisme, posisi *patron*-feodal dan *client* bisa berubah-ubah. Di arena bisnis sehari-hari, tentu saja para politisi dan pemegang jabatan adalah *patron-patron* yang tak terbantahkan. Lewat relasi personalnya, mereka menggarap jabatan yang dimiliki untuk memperbesar segala modalnya, yaitu menambah pundi-pundi uang, menambah gelar akademis, menambah jaringan, mencari jabatan prestisius. Namun, persis pada momen pilpres atau pilkada, para *patron* ini mendadak menjadi *client*. Apa pun akan dilakukan *client* untuk mendapatkan suara rakyat. Bukan hanya membagi kaus dan bansos, ia tak segan merendahkan dirinya sendiri demi mendapatkan suara sang *patron*, yaitu rakyat. ●

Dr. A. Setyo Wibowo,  
dosen STF Driyarkara, Jakarta.